

batasnya. Pemegang hak atas tanah juga hendaknya mengelola dan memanfaatkan tanah secara baik. Ini untuk menghindari pihak-pihak lain yang menggarap tanah di atas tanah milik kita menuju sistem publikasi pendaftaran tanah Positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1989. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Keppres 55 Tahun 1993*, Citra Aditha Bhakti: Bandung.

- Adrian Sutedi, 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2003. *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas tanah, Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi pemerintah*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Achmad Ali, 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone: Jakarta.
- _____, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana; Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 1983. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni: Jakarta.
- _____, 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni: Bandung.
- Badruzaman, 1985. *Hukum Agraria*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2012. *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka: Jakarta,
- Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Djambatan: Jakarta
- _____, 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, *Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*: Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Eddy Ruchiyat, 2004. *Politik Pertanahan Nasional Sampe Orde Reformasi*. Alumni: Bandung

- Effendi Perangin, 1986. *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Rajawali:Jakarta.
- _____, 1982. *Hukum Agraria Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*. CV. Rajawali: Jakarta
- _____, 1989. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press: Jakarta
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkely: University California Press, 1978), Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa: Bandung
- Herman Hermit, 2004. *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Penerbit Mandar Maju: Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 2, Konstitusi Press: Jakarta
- Kamus Besar *Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2002, Penerbit Balai pustaka: Jakarta.
- Kartasapoetra G. dkk., 1991. *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Penervbit Rineka Cipta Anggota IKAPI: Jakarta
- Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah*, Penerbit Republika, Jakarta.
- Mudjiono, 1997. *Hukum Agraria*, Liberty: Yogyakarta.
- Ninie Suparni, 1991. *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Parlindungan AP, 1996. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Makmur Maju: Bandung.
- _____, 1990. *Pendaftaran Tanah, Alumni*: Bandung

_____, 1992. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar maju: Bandung.

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia : Jakarta Timur.

Soerjono Soekanto, 1985. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung

_____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindi Persada: Jakarta.

Sumardjono M. SW., 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas: Jakarta

Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media Indonesia: Jakarta.

Situs Internet:

Teguh S., artikel tentang *pengertian Kebebasan dan Tanggungjawab*, [http://Teguh-S--fpsi10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71045-umum-Kebebasan dan Tanggungjawab.html](http://Teguh-S--fpsi10.web.unair.ac.id/artikel_detail-71045-umum-Kebebasan%20dan%20Tanggungjawab.html), dimuat tanggal 15 Januari 2013, diakses tanggal 14 November 2019.

<http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 20 November 2019.

<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Penyelesaian%20sengketa%20dibidang%20ekonomi%20keuangan%20d luar%20 pengadilan%20-%20maria m%20darus.pdf>.diakses tanggal 18 Januari 2019.

http://www.indonesianpropertylaw.com/index.php?p=1_16 diakses tanggal 18 November 2019

<http://www.klinik-pajak.com/pph-pengalihan-hak-atas-tanah-dan-atau-bangunan.html>,diakses tanggal 18 November 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 tentang *bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah*

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang *Surveyor Kadaster Berlisensi*